

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan rendahnya partisipasi masyarakat di Indonesia bukanlah hal yang baru ditemui. Adanya kendala dalam peningkatan partisipasi masyarakat apalagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, baik dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan sampai pada evaluasi pembangunan. Pada tahap perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan saran dan ideologinya sangatlah penting, karena pembangunan yang direncanakan sejatinya untuk mensejahterakan masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat yang rendah membuat pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan hanya sekedar regulasi undang-undang bagi pemerintah untuk memenuhi kinerja pemerintah tanpa adanya manfaat pembangunan tersebut bagi masyarakat.

Kendala dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan ini juga sering terjadi di perdesaan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah diatur di dalam Undang-undang Desa No.6 tahun 2014. Dalam undang-undang ini juga mengatur bahwa masyarakat desa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Adanya Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 membawa angin segar dalam upaya peningkatan partisipasi pembangunan desa. Hal ini tertuang dalam pasal 68 ayat (1) dan (2) konstitusi menjamin keterlibatan masyarakat desa sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi

di Desa. Namun, hingga hari ini masih banyak penyelenggaraan pembangunan desa yang tidak mencapai tujuannya. Contohnya saja dapat dilihat pada data BPS pada 2018 yang merilis sebanyak 13.232 desa masih berada pada kategori desa tertinggal (Ronny Wicaksono dalam Times Indonesia 19 November 2020).

Salah satu desa yang mengalami masalah peningkatan partisipasi masyarakat adalah Nagari Koto Rantang yang terletak di Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam. Nagari ini terletak disepanjang jalan lintas sumatera dan terletak jauh dari pusat kabupaten maupun kota. Nagari Koto Rantang terdiri dari 4 jorong yaitu Batang Palupuh, Sitingkai, Muaro, Mudiak Palupuh. Keberadaan nagari Koto Rantang yang jauh ini membuat nagari ini terlihat terpencil.

Nagari Koto Rantang perlu meningkatkan pembangunan di wilayahnya agar bisa terlepas dari desa tertinggal. Tentunya pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan yang masyarakat butuhkan. Untuk melakukan pembangunan, pemerintah nagari tidak bisa hanya bergerak sendiri, perlu adanya campur tangan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunannya.

Partisipasi dari masyarakat Koto Rantang masih rendah dalam perencanaan pembangunan. Padahal masyarakat desa berhak terlibat dalam perencanaan hingga sampai kepada evaluasi pembangunan nagari. Salah satu indikator rendahnya partisipasi masyarakat adalah masyarakat yang cukup sibuk dalam kesehariannya membuat mereka malas untuk ikut berpartisipasi dan jika ingin berpartisipasi dalam perencanaan kegiatan pembangunan desa masyarakat akan menimbang keuntungan yang mereka dapatkan jika mereka berpartisipasi dalam kegiatan

tersebut. Dalam data daftar hadir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari Koto Rintang tahun 2020 (MUSRENBANG) masyarakat yang hadir hanya perwakilan seperti wali jorong, perwakilan dari lembaga-lembaga dan perwakilan dari pemuda.

Masalah kendala peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan ini penting untuk diteliti. Agar alasan dari kendala peningkatan partisipasi masyarakat ini dapat dikaji penyelesaiannya. Pembangunan yang direncanakan dan yang dilaksanakan tanpa adanya partisipasi dan saran dari masyarakat hanya akan menjadikan pembangunan tersebut sebuah pembangunan yang dikehendaki dari pemerintah. Pemerintah nagari seharusnya memberikan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan menyalurkan ide mereka. Wadah yang demokratis serta kondusif untuk terlaksananya partisipasi.

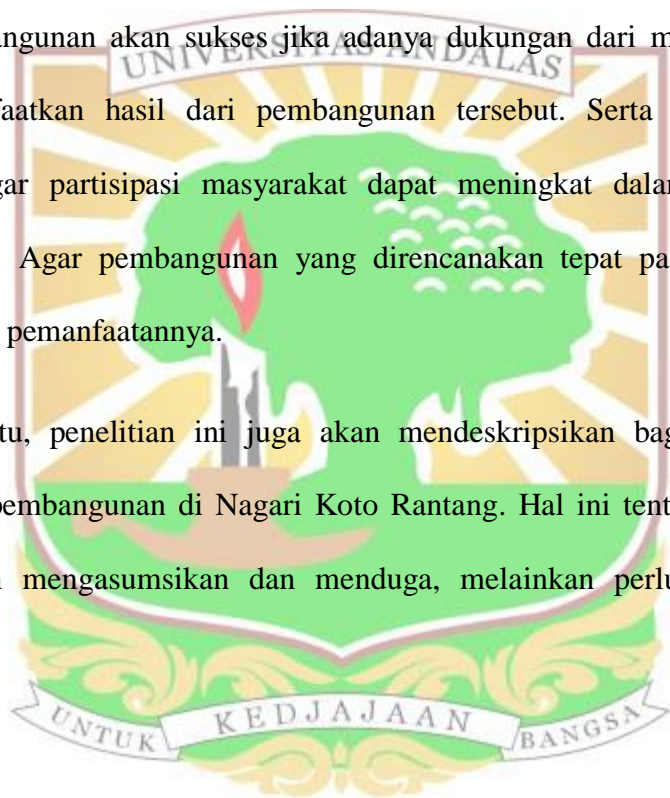
Selain itu, jikapun ada masyarakat yang ikut serta dalam perencanaan pembangunan nagari hanya beberapa saja sebagai perwakilan. Hal ini dapat menyebabkan ketidaktahuan dan ketidakpedulian masyarakat yang lain terhadap pembangunan yang ada di nagarinya sendiri. Jika pembangunan itu tidak berhasil masyarakat akan menyalahkan kinerja pemerintah nagari yang tidak sempurna dan gagal.

Penelitian tentang masalah partisipasi masyarakat memang cukup banyak. Baik dalam bidang pembangunan tertentu maupun penelitian partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara keseluruhan. Berbeda dengan penelitian kali ini permasalahan partisipasi masyarakat akan dilihat dalam perencanaan

pembangunan nagari. Karena pada tahap perencanaan disitulah bagaimana beberapa pendapat bisa menjadi satu. Selain itu penelitian ini berada di nagari yang tidak banyak orang yang mengetahui tentang nagari ini. Hal ini membuat nagari ini jarang menjadi objek penelitian bagi peneliti.

Fokus penelitian ini adalah mencari tahu upaya dan kendala peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari. Karena sejatinya sebuah pembangunan akan sukses jika adanya dukungan dari masyarakat yang akan memanfaatkan hasil dari pembangunan tersebut. Serta mencari solusi bagaimana agar partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam perencanaan pembangunan. Agar pembangunan yang direncanakan tepat pada sasaran dan optimal dalam pemanfaatannya.

Selain itu, penelitian ini juga akan mendeskripsikan bagaimana proses perencanaan pembangunan di Nagari Koto Rantang. Hal ini tentunya tidak bisa hanya dengan mengasumsikan dan menduga, melainkan perlu dikaji secara ilmiah.



1.2 Rumusan Masalah

Keberadaan Nagari Koto Rantang yang terletak jauh dari pusat kabupaten maupun kota menjadikan nagari ini kurang mendapatkan perhatian dalam hal pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan nagari demi menunjang kelancaran pembangunan. Pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan, tentunya

harus ada campur tangan masyarakat dalam perencanaannya. Masalah yang muncul di nagari ini adalah kendala peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari.

Mencari penyelesaian dari masalah partisipasi masyarakat ini sangatlah penting. Agar pembangunan di nagari dapat tepat sasaran dan optimal dalam pemanfaatannya. Serta mencari tahu upaya dan kendala peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari. Serta seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan nagari. Dari fenomena di atas dibutuhkan penjelasan yang ilmiah supaya hal tersebut dapat terwujud, maka dari itu dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana upaya dan kendala peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

A. Tujuan Umum

Untuk mengetahui upaya dan kendala peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari.

B. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui proses perencanaan pembangunan di Nagari Koto Rantang.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Aspek akademik

Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi Sosiologi Pembangunan.

b. Aspek Praktik

Bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Partisipasi

Partisipasi, maksudnya partisipasi sosial atau partisipasi masyarakat (*social participation*), adalah suatu bentuk interaksi sosial yang menjadi perhatian kajian sosiologi dan beberapa disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya. Terutama semenjak berakhirnya perang dunia ke dua, masalah partisipasi menjadi salah satu pokok kajian yang semakin banyak memperoleh perhatian. Yaitu setelah terbentuknya banyak negara nasional baru seperti Indonesia yang menganut kebijakan “pembangunan berdasarkan perencanaan tersentralisasi”.

Partisipasi secara populer, yaitu berarti ikut serta atau keikutsertaan. Keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan dapat terjadi karena keinginan sendiri secara sukarela dan bisa pula karena terpaksa atau karena perintah. Paksaan tersebut bisa secara terang-terangan, dapat pula secara terselubung. Kedua jenis keikutsertaan tersebut dibedakan dengan konsep yang berbeda. Bagi keikutsertaan karena keharusan atau karena perintah yang tidak atas pilihan sendiri secara sukarela digunakan konsep mobilisasi. Sedangkan untuk keikutsertaan yang atas keinginan sendiri secara sukarela dipakai konsep partisipasi.

Partisipasi yang diartikan sebagai keikutsertaan atas kemauan sendiri secara sukarela dapat terjadi karena alasan yang berbeda. Pertama, karena pertimbangan atau perhitungan rasional. Yaitu atas dasar kalkulasi untung dan rugi. Yang kedua, karena rasa keterpanggilan atau kesetiakawanan, atau rasa perikemanusiaan tanpa pertimbangan untung dan rugi. Akan tetapi dapat pula terjadi karena gabungan kedua alasan tersebut.

Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan partisipasi, sebagai suatu konsep dalam kajian ilmiah terutama dalam sosiologi, ada beberapa definisi partisipasi sebagai berikut:

Fairchild (1962) mengartikan partisipasi sebagai berbagi atau ambil bagian (*sharing*) dalam proses interaksi secara sadar karena rasa kesetiaan dan kecintaan serta rasa tanggung jawab terhadap kelompok masyarakat dimana ia menjadi anggota.

Blumberg (1976) menyebutnya sebagai proses interaksi yang saling mempengaruhi dari dua atau lebih pihak yang terlibat dalam perencanaan, menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Turton (1987) mendefinisikan partisipasi sebagai usaha yang terorganisasi dalam meningkatkan penguasaan (*control*) atas sumber daya dan atas lembaga atau badan yang mengatur sumber daya tersebut bagi mereka yang tadinya tidak diikutkan. Dusseldorp (1981) mengartikan sebagai bentuk interaksi dan komunikasi yang khas, yaitu berbagi (*sharing*) dalam kekuasaan serta dalam tanggung jawab. McClosky (1972) didalam ilmu politik memahaminya sebagai aktivitas sukarela dari anggota suatu masyarakat yang ambil bagian (*sharing*) dalam pemilihan para pemimpin dan secara langsung atau tidak juga ambil bagian dalam perumusan kebijakan.

Dari definisi yang dikemukakan diatas meskipun tidak semuanya secara eksplisit mengemukakan unsur keinginan sendiri atau sukarela, namun mereka menggunakan istilah “andil” atau “ambil bagian” atau “berbagi (*share/sharing*)”. *Share* atau *sharing* juga mengandung pengertian keikutsertaan yang bersifat sukarela dan sekaligus demokratis. *Sharing* tidak mungkin terjadi dalam suasana yang tidak demokrasi. Apalagi *sharing* dalam proses pengambilan keputusan, dalam perencanaan, dalam menentukan kebijakan, bahkan juga dalam kekuasaan seperti yang ditekankan di dalam definisi tersebut tidak mungkin terlaksana dalam kehidupan yang tidak demokratis atau otoriter.

Secara tersurat (eksplisit) dan tersirat (implisit), ada dua masalah yang memerlukan perhatian khusus. Dan kedua masalah itulah yang menjadi pokok perhatian dalam partisipasi. Yang pertama, adanya indikasi tentang keracunan

pengertian konsep partisipasi itu sendiri. Yang kedua, masih belum adanya kesamaan pendapat tentang keadaan atau kondisi serta iklim kehidupan yang bagaimana dipandang atau dinilai kondusif (kondisi yang sangat baik), bagi tumbuhnya partisipasi yang dimaksud.

Soetrisno (1995) mengidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut, yaitu:

1. Masalah pertama adalah belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan.
 - a. Pada tataran perencanaan, partisipasi diartikan sebagai kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif dan hanya sebagai sub-ordinasi pemerintah.
 - b. Pada pelaksanaan pembangunan di lapangan, pembangunan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat, sedangkan yang dirancang dan ditetapkan masyarakat didefinisikan sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas lebih rendah.
 - c. Partisipasi masyarakat, sering didefinisikan sebagai kerjasama pemerintah dan masyarakat yang tidak pernah memperhatikan adanya sub sistem yang disubordinasikan oleh suprasistem dan aspirasi masyarakat cukup diakomodasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,

2. Masalah kedua adalah dikembangkannya pembangunan sebagai ideologi baru yang harus diamankan dengan dijaga ketat mendorong aparat pemerintah bersifat otoriter. Kondisi seperti itu dapat menimbulkan reaksi balik berupa “budaya diam” yang pada gilirannya menumbuhkan keengganan masyarakat untuk berpartisipasi.
3. Masalah ketiga adalah, banyaknya peraturan yang meredam keinginan masyarakat untuk berpartisipasi.

1.5.2 Konsep Perencanaan Pembangunan

Secara sederhana perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kesulitan dari perencanaan ini adalah adanya faktor pembatas. Faktor pembatas ini bisa berasal dari minimnya biaya, minimnya anggota yang berpartisipasi dan masih banyak lagi. Kesulitan lainnya dalam perencanaan adalah apabila adanya faktor luar yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan tersebut.

Faktor luar bersifat eksternal, kita tidak dapat mengatur dan mengendalikannya. Dalam tahapan ini kita bisa mengatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan setelah memperhatikan pembatas internal dan pengaruh eksternal, memilih serta menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam Kamus Management karangan Moekijat (1980) beberapa arti perencanaan yaitu:

1. Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta dalam hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.
2. Perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan artinya menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan dan di mana hal itu dilakukan.
3. Perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
4. Perencanaan adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-tujuan yang diinginkan dan bagaimana tujuan tersebut harus dicapai.

Dari definisi perencanaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan merupakan usaha atau tindakan yang telah tersusun untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menimbang berbagai aspek untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Soerjono Soekanto (2004), sebelum dilaksanakannya pembangunan pemerintah akan menyerap aspirasi masyarakat. Perpaduan dari visi pemerintah dan aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan dalam perencanaan pembangunan.

Dalam pemerintahan Orde Lama program pembangunan dijalankan adalah Rencana Pembangunan Lima Tahun (1956 hingga 1961), yang dilanjutkan dengan Rencana Pembangunan Semesta (1961). Pada pemerintahan Orde Baru, pembangunan dirancang dalam bentuk rencana pembangunan jangka Panjang

dengan periode 25 tahun, kemudian pembangunan jangka menengah dengan periode 5 tahun dan pembangunan jangka pendek tahunan. Sementara itu rencana pembangunan pada masa Reformasi (1999-2004) dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Dalam Propenas termuat sembilan sektor kehidupan masyarakat yang direncanakan untuk dibangun yaitu politik, pertahanan dan keamanan, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, kelautan dan industri.

1.5.3 Konsep Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Perencanaan dapat dibagi menjadi dua versi yaitu satu versi melihat perencanaan adalah suatu teknik atau profesi yang membutuhkan keahlian dan versi yang satu lagi melihat perencanaan (pembangunan) adalah keinginan kolektif yang harus melibatkan seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Perencanaan pembangunan pada akhirnya harus mendapat persetujuan masyarakat.

Pada masa orde baru perencanaan pembangunan di Indonesia menggunakan metode *top down*. Akibatnya pembangunan yang ada di daerah-daerah tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh daerah tersebut. Masyarakat bahkan tidak dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut, sedangkan partisipasi masyarakat hanya ada pada mobilisasi masyarakat untuk melakukan pembangunan.

Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam perencanaan pembangunan di daerah. Hingga perencanaan sampai pada tujuan

yang diharapkan. Sugihartono (2003) mengemukakan perencanaan pembangunan partisipatif dapat diartikan sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan yang dilakukan secara sadar dan sistematis yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan. Keberadaan Musrenbang sebagai tempat masyarakat memahami isu pembangunan sangat penting.

Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bidang fisik maupun materil dalam bidang pembangunan. Pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaannya dianggap tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Padahal masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui permasalahan yang mereka hadapi dan mengerti apa yang mereka butuhkan untuk mengatasi permasalahan.

1.5.4 Tinjauan Sosiologis

Penelitian ini menggunakan teori sistem yaitu sistem perilaku menurut Lane dalam Aziz Saleh (1990). Dalam teori sistem ini melihat masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari sejumlah sub-sistem, pada umumnya memandang masyarakat sebagai suatu sistem perilaku atau sistem sosial. Menurut teori ini, suatu gejala sosial tidak akan dapat dipahami secara terpisah dari sistem sosial atau dari sistem perilaku.

Masyarakat sebagai suatu sistem perilaku, menurut Lane (1978) terdiri dari tiga sub sistem utama yang penting dan yang saling berkaitan, yaitu tata nilai serta norma sentral yang dominan, perangkat institusi sosial, pola interaksi antar individu, serta antar individu dan institusi partisipasi sebagai suatu gejala sosial

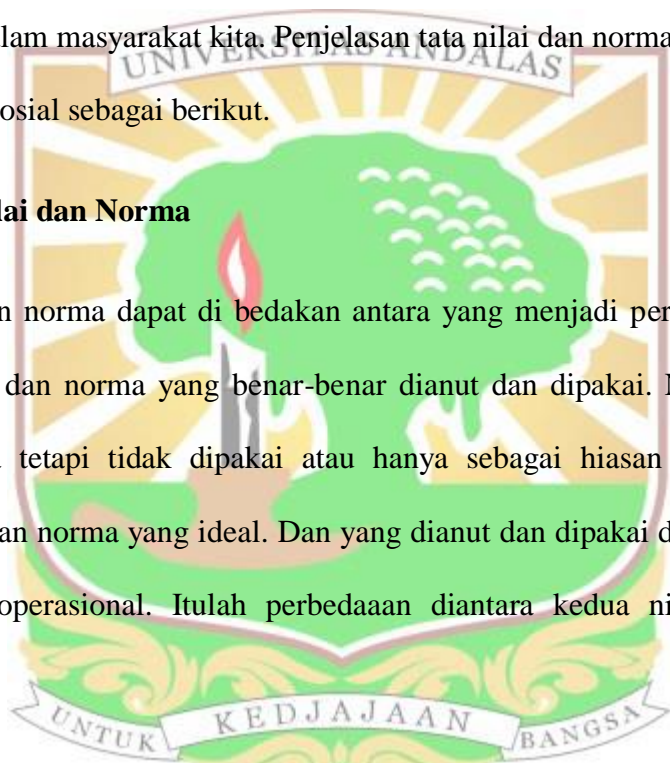
adalah suatu bentuk perilaku yang merupakan bagian atau sub-sistem dari sistem interaksi. Pada akhirnya sub-sistem interaksi ini juga merupakan sub-sistem dari sistem perilaku itu.

Berdasarkan kerangka pikiran ini partisipasi hendak dipahami. Partisipasi dalam hubungannya dengan tata nilai dan norma yang berlaku dengan institusi sosial yang operasional dan juga dengan pola interaksi yang berlaku atau yang operasional dalam masyarakat kita. Penjelasan tata nilai dan norma, institusi sosial dan interaksi sosial sebagai berikut.

Tata Nilai dan Norma

Nilai dan norma dapat di bedakan antara yang menjadi perhiasan perataan saja dan nilai dan norma yang benar-benar dianut dan dipakai. Nilai dan norma yang diterima tetapi tidak dipakai atau hanya sebagai hiasan perkataan saja disebut nilai dan norma yang ideal. Dan yang dianut dan dipakai disebut nilai dan norma yang operasional. Itulah perbedaaan diantara kedua nilai dan norma tersebut.

Hubungan partisipasi dengan nilai dan norma jika dikemukakan dalam pertanyaan adalah apakah nilai dan norma yang ideal menghargai serta memberikan tempat dan ruang yang cukup dan layak bagi partisipasi? Kita yakin bahwa Pancasila adalah tata nilai dan norma kehidupan masyarakat yang ideal. Akan tetapi nilai dan norma yang ideal masih belum cukup. Nilai dan norma yang ideal secara formal telah diterima dan disepakati belum tentu dijadikan pedoman dan dasar ukuran dan diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari.



Oleh karena itu masih perlu dipertanyakan lagi nilai dan norma yang operasional dalam kehidupan masyarakat, menghargai serta memberikan ruang yang cukup dan layak bagi partisipasi. Karena setiap orang sebagai warga negara mempunyai kewajiban dan hak yang sama, dijamin dan dilindungi oleh hukum. Yaitu dalam kehidupan yang menerima dan menghargai persamaan, keterbukaan, menerima dan menghargai perbedaan pendapat.

Bahkan tidak hanya menerima dan menghargai saja, tetapi juga mempercayai sebagai suatu yang sangat esensial bagi pembentukan kepribadian yang bersifat demokratis, mandiri, percaya diri, berfikir kritis dan kreatif serta saling menghormati dan menghargai antara sesama. Kepribadian seperti inilah yang membuat sebuah partisipasi menjadi kondusif. Kehidupan dan pertumbuhan partisipasi memerlukan tata nilai dan norma (ideal dan operasional) yang menerima dan menghargai persamaan, keterbukaan, perbedaan pendapat dan berpikir kritis.

Institusi Sosial

Apabila nilai dan norma baik yang ideal maupun yang operasional sudah baik bagi partisipasi, masih perlu dilihat hubungan partisipasi dengan institusi-institusi sosial yang ada. Terutama institusi sosial yang penting seperti pola, tradisi, adat-istiadat, hukum dan proses sosial juga dengan keluarga, agama, pendidikan serta dengan organisasi-organisasi sosial, politik ekonomi dan negara. Pertanyaannya apakah institusi tersebut baik untuk menunjang bagi tumbuhnya partisipasi atau tidak.

Interaksi Sosial

Dalam wujud perilaku yang konkrit, kehidupan yang bersifat demokratis itu dapat diamati dalam pola dan proses interaksi antara individu sesama anggota masyarakat, serta antara individu dengan institusi sosial. Dalam bentuk pergaulan baik dalam proses kerjasama maupun dalam persaingan antara sesama anggota masyarakat dan juga dalam bentuk hubungan antara anggota masyarakat dengan negara, keluarga, organisasi pemerintahan dan politik serta dengan institusi sosial lainnya. Pertanyaan adalah apakah pola serta proses interaksi tersebut berlangsung secara demokratis atau tidak.

Kehidupan dan pertumbuhan partisipasi memerlukan bentuk pergaulan yang dilaksanakan atas dasar keterbukaan, persamaan hak dan kewajiban, menghargai budaya berfikir kritis, menghargai perbedaan pendapat, tidak bersikap otoriter, serta mempunyai semangat bekerjasama serta sifat-sifat dan perilaku demokratis lainnya. Jadi suasana partisipasi yang baik dan kondusif memerlukan suasana kehidupan yang demokratis.

Teori sistem yaitu masyarakat sebagai sistem perilaku ini sangat cocok untuk menjelaskan dan menerangkan fenomena partisipasi yang terjadi di nagari Koto Rintang. Teori ini dapat menjelaskan hasil penemuan peneliti nantinya dari fenomena ini. Dengan menggunakan teori ini barulah bisa peneliti mendapatkan titik terang dan penjelasan yang baik bagi masalah rendahnya partisipasi dan kendala peningkatan partisipasi masyarakat nagari Koto Rintang dalam perencanaan pembangunan nagari.

1.5.5 Penelitian Relevan

Beberapa penelitian yang relevan mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan seperti penelitian yang dilakukan oleh **Angelius Henry Sigalingging (2014)** yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi)”**. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana partisipasi masyarakat kecamatan Sidikalang dalam perencanaan pembangunan. Penelitian ini juga meneliti penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh **Yuni Kurniati (2019)** yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Mulyorejo 1 Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara”**. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan pembangunan desa di desa tersebut. Penelitian ini juga membahas tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu penelitian ini bukan hanya membahas faktor penghambat partisipasi masyarakat melainkan juga faktor pendorong partisipasi masyarakat.

Penelitian relevan yang ke-tiga oleh **Mahdaleni (1994)** yang berjudul **“Partisipasi Perantau Terhadap Pembangunan Desa Asal Studi Kasus di Desa Lumindai Kecamatan Berangin Kodya Sawahlunto”**. Penelitian ini meneliti tentang karakteristik perantau, partisipasinya terhadap pembangunan desa asal, dalam bentuk apa mereka berpartisipasi, faktor pendorong mereka

berpartisipasi dan mempelajari dampak atau efek yang ditimbulkan dari partisipasi perantau.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Menurut Strauss dan Corbin (2003:4) mendefinisikan metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Dalam kata lain dalam metode kualitatif data yang didapatkan berupa deskriptif dan kata-kata. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. (Afrizal 2014:13)

Pendekatan ini dianggap tepat untuk digunakan dalam menganalisis secara mendalam permasalahan partisipasi masyarakat dan perencanaan pembangunan nagari di nagari Koto Rantang. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi* (Sugiono 2008:9).

Alasan peneliti memilih penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memberikan gambaran fakta yang terjadi pada fenomena yang diteliti. Mendeskripsikan data yang telah didapat di lapangan, seperti bagaimana kontribusi masyarakat di nagari Koto Rantang dalam musyawarah perencanaan pembangunan nagari.

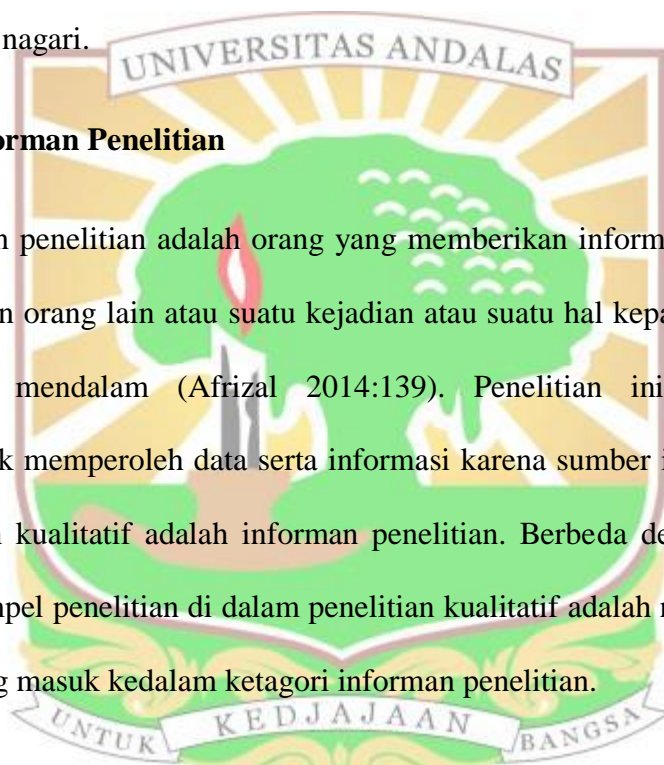
1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal 2014:139). Penelitian ini menggunakan informan untuk memperoleh data serta informasi karena sumber informasi utama dari penelitian kualitatif adalah informan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif sampel penelitian di dalam penelitian kualitatif adalah narasumber atau partisipan yang masuk kedalam kategori informan penelitian.

Afrizal (2014:139) membagi kategori informan menjadi 2 yaitu informan pengamat dan informan pelaku.

1. Informan Pengamat

Informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Mereka dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Dalam berbagai literatur mereka ini disebut pula informan



kunci. Informan pengamat dalam penelitian ini adalah pemerintah nagari Koto Rantang karena pemerintah nagarilah yang tau bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan nagari dan berapa banyak kehadiran atau partisipasi masyarakat saat munyawarah perencanaan pembangunan nagari.

2. Informan pelaku

Para informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Informan pelaku dalam penelitian ini tentunya adalah masyarakat Nagari Koto Rantang karena masyarakatlah yang sangat mengetahui apa kendala partisipasi yang mereka rasakan dalam perencanaan pembangunan nagari.

Mereka adalah subjek penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti harus terlebih dahulu menentukan posisi informan sebagai pengamat atau sebagai pelaku. Tentu saja satu orang informan dapat memainkan peran keduanya. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengumpulan datanya atau pemilihan informan. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misal orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiono 2007:219). Teknik ini juga disebut dengan mekanisme disengaja adalah sebelum melakukan penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang

mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi (Afriзал 2014:140).

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka peneliti telah mengetahui identitas dari informan sebelum penelitian dilakukan. Adapun kriteria-kriteria informan yang telah ditentukan yaitu:

1. Selaku pelaksana rapat musyawarah perencanaan pembangunan nagari yaitu lembaga pemerintahan nagari Koto Rantang. Wali nagari (pimpinan nagari), sekretaris nagari dan pihak nagari yang terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan nagari.
2. Masyarakat Nagari Koto Rantang yang berpeluang ikut serta dalam perencanaan pembangunan nagari. Unsur masyarakat ini akan menyesuaikan dengan masyarakat yang ada di Nagari Koto Rantang.

Penelitian kualitatif sangat mengedepankan kualitas dari data yang dikumpulkan. Kebenaran dari data sangatlah penting bagi peneliti karena menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Kriteria yang ditetapkan untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan dan menetapkan informan penelitian.

1.6.3 Data yang Diambil

Penelitian kualitatif menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa upaya pengkuantifikasiannya. Data tersebut terdiri dari pembicaraan-pembicaraan orang atau lisan, tulisan-tulisan (tulisan dimedia, surat menyurat, kebijakan pemerintah, notulen rapat, dan lain-lain), aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang, isyarat-isyarat yang disampaikan orang dan ekspresi

fisik seperti raut muka ketika marah atau gembira (Afrizal 2014:18). Dalam penelitian kualitatif terdapat dua sumber data (Sugiyono,2017:104) yaitu :

1. Data Primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang didapatkan langsung dari orang atau kelompok yang diteliti dalam penelitian ini. Seperti hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dalam penelitian yang berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah.

2. Data Sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder biasanya didapatkan dari lembaga atau instansi yang ada di lokasi penelitian..

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah komponen penting dalam sebuah penelitian. Dengan teknik pengumpulan data yang tepat maka data yang dikumpulkan akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner, dokumentasi dan gabungan keempatnya (Sugiono 2007:225).

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara Mendalam

Esterberg (2002) mengatakan wawancara adalah merupakan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiono 2007:231). Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam dilakukan dengan tidak terstruktur dan dilakukan berulang-ulang kali. Wawancara tidak terstruktur adalah suatu wawancara dimana orang yang diwawancarai (disebut informan) bebas menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara (Afrizal 2014:136). Pewawancara mungkin mempunyai daftar pertanyaan tapi tidak dilengkapi dengan pilihan jawaban. Pengulangan wawancara terhadap informan dilakukan untuk mendalami atau mengkonfirmasi informasi.

Situasi wawancara antara peneliti dengan para informannya memengaruhi kualitas hasil wawancara mendalam atau kualitas data yang diperoleh (Afrizal 2014:137). Dengan begitu peneliti akan mewawancarai informan disaat informan tidak dalam keadaan sibuk agar proses wawancara berjalan santai. Wawancara mendalam dilakukan kepada seluruh informan baik informan pelaku maupun informan pengamat dalam penelitian. Dengan penelitian langsung di lapangan dengan wawancara mendalam, pertama sekali peneliti melakukan pendekatan dengan informan. Peneliti memulai wawancara dengan memperkenalkan identitas peneliti dan tujuan kedatangan peneliti. Agar dalam proses wawancara tidak terkesan formal, peneliti tidak akan mengatakan kalau ingin mewawancarai, tetapi peneliti akan mengajak berdiskusi dan berbincang dengan informan tentang topik penelitian.

Selanjutnya peneliti akan mewawancarai informan sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh informan, hal ini dimaksud agar tidak mengganggu aktivitas informan, dan tempat untuk mewawancarai juga akan disesuaikan dengan keinginan informan. Wawancara inipun akan dilakukan secara berulang-ulang sampai peneliti mendapatkan data yang diinginkan, dan jika ada hal-hal yang dianggap kurang untuk mendukung penelitian ini, peneliti akan menghubungi kembali informan tersebut dan menanyakan hal-hal yang bersifat umum untuk di akhiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat khusus. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah *handphone*, pena, kertas dan pancaindra peneliti sendiri.

1. Daftar pedoman wawancara digunakan sebagai pedoman dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan.
2. Buku catatan dan pena digunakan untuk mencatat seluruh keterangan yang di berikan oleh informan.
3. Hand Phone digunakan untuk merekam sesi wawancara yang sedang berlangsung.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung pada objek yang di teliti dengan menggunakan pancaindra. Observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja dan gejala-gejala alam dengan observasi kita dapat melihat, mendengar dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi (Sugiono, 2012: 166).

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiono 2007:240). Hasil penelitian dari wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau diukung oleh bukti dokumen.

Pada penelitian ini pengumpulan data dokumen yang dibutuhkan berupa absensi kehadiran masyarakat maupun perwakilannya dalam musyawarah perencanaan pembangunan nagari. Dokumen ini menjadi data pendukung yang didapat dari sekretariat pemerintah nagari ditambah dengan penjelasan dari pihak pemerintah nagari dalam wawancara.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah seluruh hal yang kita teliti untuk mendapatkan penjelasan ringkas mengenai keseluruhan unit dan untuk menjelaskan berbagai perbedaan diantara unit analisis tersebut (Morissan 2019:31). Unit analisis dalam penelitian sosial bisa berupa individu ataupun kelompok sesuai dengan fokus penelitiannya. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yaitu individu yang ada dalam unsur masyarakat. Dan juga organisasi pemerintahan sebagai pengamat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan nagari

1.6.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiono 2007:244). Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang lebih ditekankan pada interpretatif kualitatif. Data yang didapat dilapangan, baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder dicatat dengan catatan lapangan.

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder barulah dilakukan analisis pada data tersebut dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Agar data yang diperoleh lebih akurat, analisis data ini menggunakan teknik triangulasi (*chek and recheck*). Artinya mengecek kembali kebenaran dari informasi yang telah didapat pada sumber lain.

1.6.7 Definisi Operasional Konsep

Ada beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini dan perlu diberi batasan untuk mempermudah peneliti dalam memahaminya. Definisi konsep ini merupakan informasi ilmiah yang membantu peneliti dalam mengukur variable yang digunakan. Untuk menghindari kerancuan dalam pemakaian konsep, maka perlu didefinisikan konsep-konsep yang dimaksudkan adalah :

1. Upaya

Upaya adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar.

2. Kendala

Kendala adalah halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang menghalangi untuk mengikuti perencanaan pembangunan di Nagari Koto Rantang.

3. Partisipasi

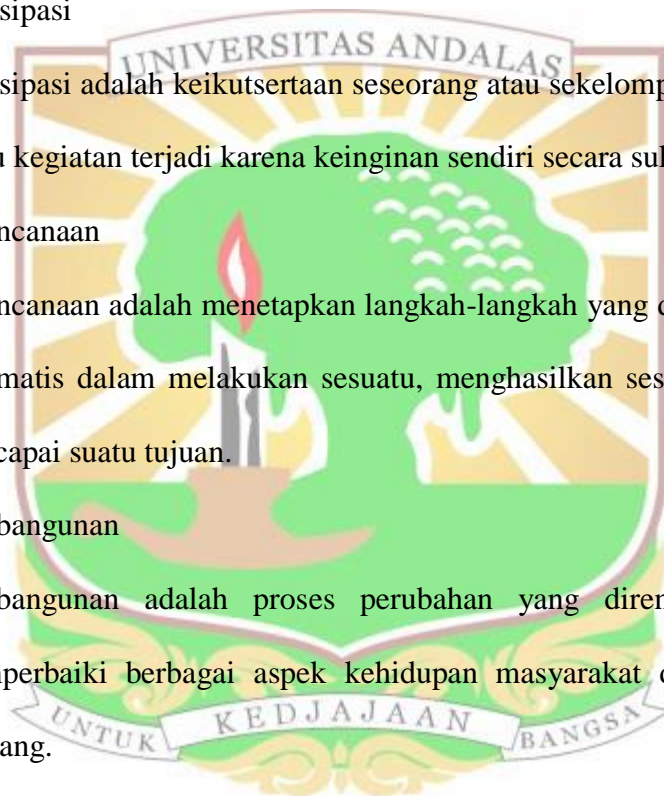
Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan terjadi karena keinginan sendiri secara sukarela.

4. Perencanaan

Perencanaan adalah menetapkan langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis dalam melakukan sesuatu, menghasilkan sesuatu atau untuk mencapai suatu tujuan.

5. Pembangunan

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat di Nagari Koto Rantang.



1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi peneliti dapat diartikan sebagai setting atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014: 128). Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat nagari Koto Rantang yang seharusnya dapat berpartisipasi dalam

perencanaan pembangunan nagari. Pertimbangan lokasi penelitian bersifat mutlak berada diwilayah nagari Koto Rantang karena informan penelitian yang akan didapatkan berada di nagari Koto Rantang dan juga daerah yang dipilih untuk diteliti adalah nagari Koto Rantang. Alasan memilih nagari Koto Rantang sebagai wilayah penelitian karena tempat tinggal peneliti berada diwilayah nagari tersebut dan juga peneliti mengenal kehidupan masyarakat di nagari tersebut. Hal ini memudahkan peneliti dalam melakukan wawancara mendalam dan juga mendapatkan dokumen yang dibutuhkan untuk sumber data penelitian. Selain itu juga untuk memperkenalkan nagari Koto Rantang kepada yang belum mengetahui keberadaan nagari tersebut.

1.6.9 Rancangan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dimulai dari bulan November 2020 sampai bulan April 2021. Untuk lebih jelasnya tahapan penelitian di uraikan pada tabel sebagai berikut :

